

**CASCADING INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

TUJUAN	Indikator Tujuan	Target	SASARAN	Indikator Sasaran	Target					PROGRAM	Sasaran Program	Indikator Program	Target Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan				
					2026	2027	2028	2029	2030																
1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Intern Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	3.21 (Level 3)	1. Meningkatkan Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3.025 (Level 3)	3.050 (Level 3)	3.075 (Level 3)	3.100 (Level 3)	3.125 (Level 3)	1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	1. Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	83%	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	98 Entitas	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	3 Laporan				
				2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	75,00 (Waspada)	77,00 (Waspada)	78,00 (Terjaga)	79,00 (Terjaga)	80,00 (Terjaga)			2. Tindak lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun Anggaran N-1	84%					2. Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan	98 Kegiatan	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	39 Laporan		
				3. Nilai <i>Monitoring Controlling Surveillance for Prevention</i> (MCSP) KPK	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00			2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan organisasi atau peraturan pemerintahan							Jumlah pengawasan dengan tujuan yang dilaksanakan	34 Kegiatan	3. Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya reviu laporan kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	12 Laporan
																						4. Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	12 Laporan
																						5. Pengawasan Desa	Terlaksananya pengawasan desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	21 Laporan
																						6. Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya kerjasama pengawasan internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 Kesepakatan
																						7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	10 Dokumen
																						8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya penyelesaian kerugian negara / daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	6 Laporan
																						9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	28 Laporan
																						10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi
2. Meningkatkan Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan	Indeks Layanan Kepuasan Stakeholder	82%	85%	88%	90%	2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK-APIP)	3.050 (Level 3)	3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	100%	10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi								
																		11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi				
																		12. Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah	1. Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	93%	12. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	30 Perangkat Daerah
13. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	15 Perangkat Daerah																						













